

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data hasil wawancara, observasi lapangan dan, telaah dokumen, peneliti melakukan analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Kurangnya dukungan anggaran pada masing – masing UPP menjadi kendala dalam optimalisasi implementasi kebijakan PermenPANRB No.16 Tahun 2017.
2. Kurangnya sumber daya manusia dalam pelaksanaan forum konsultasi publik juga menjadi faktor kendala kurang optimal implementasi kebijakan PermenPANRB No.16 Tahun 2017.
3. Kurangnya komitmen pimpinan unit penyelenggara pelayanan publik juga menjadi faktor kendala kurang optimal implementasi kebijakan PermenPANRB No.16 Tahun 2017.

Adapun strategi yang dilakukan dalam menjawab pertanyaan rumusan permubasalah yang kedua adalah dengan melakukan beberapa langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan revisi terhadap peraturan Menteri PANRB no. 16 tahun 2017
2. Membuat surat edaran Menteri (SE) agar semua UPP melaksanakan FKP dan penekanannya sebagai indicator penilaian reformasi birokrasi (indek RB) dan wajib menyampaikan pelaporan dan tindak lanjut pelaksanaannya dengan menetapkan batas akhir penyampaian laporan.
3. Melakukan sosialisasi, pendampingan, bimbingan teknis pelaksanaan dan penyusunan pelaporan FKP pada UPP yang belum melaksanakan FKP dan menyampaikan laporannya sebagai skala prioritas kegiatan pada Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat.
4. Masing-masing UPP wajib menyusun usulan anggaran pelaksanaan kegiatan FKP menjadi skala prioritas anggaran.

5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan FKP pada masing-masing UPP dan memberikan rekomendasi atas pelaporan yang di sampaikan, serta pemberian reward dan sanksi bagi UPP dalam rangka mendorong kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

B. Saran

Saran dan rekomendasi optimalisasi implementasi kebijakan Peraturan Menteri No.16 Tahun 2017 berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dikemukakan saran - saran, sebagi berikut :

1. Perlu dibuatkan revisi Permenpanrb tentang pedoman penyelenggaran FKP pada UPP.
2. Perlu dibuatkan surat edaran (SE) yang menekankan pada masing-masing UPP pelaksanaan FKP sebagai usulan anggaran pada program kegiatan priorital yang harus dilaksanakan.
3. Pengembangan kapasitas SDM pelaksana kegiatan FKP melalui bimtek pelaksanaan dan penyusunan pelaporan FKP
4. Mendorong komitmen masing-masing pimpinan kepala UPP untuk melaksanakan FKP sebagai penilaian kinerja (indicator indek RB) dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik
5. Sosialisasi, pendampingan, dan bimtek tentang FKP lebih masiv pada masinf-masing UPP yang belum melaksanakan FKP

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aquino, P.G., & Jalagat, R.C. (eds). (2022). *Effective Public Administration Strategies for Global New Normal*. Singapore: Springer Naturee Singapoire Pte Ltd.
- Cooper, D.R., & Schindler, P.SW. (2014). *Business Research Methods*. Twelfth edition. New York: McGraw-Hill/Irwin.
- Creswell, J.W., & Creswell, J.D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches..* Fifth edition. Los Angeles: SAGE Publications, Inc.
- Dye, T.R. (2017). *Understanding Public Policy*. Fifteenth edition. Florida: Florida State University. & Pearson Education Inc.
- Grindle, M. (2017). *Politics and policy implementation in the Third World*. Princetin Univesity Press.
- Kehs, S. (2023). *Public Administration for Planners: Leadership and Responsibilities in Theory and Practice*. New York: Routledge.
- Lincoln, Y.S., & Guba, E.G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. California: SAGE Publications.
- Miles, M.B., Hubeman, A.M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Edition 3. Arizona: SAGE Publications, Inc.
- Sekaran, U., & Bougiee, R. (2016). *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach*. Seveneth edition. West Sussex: John Wiley & Sons Ltd.
- Supraja, G., & Budi, P. (2019). Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran melalui e-Government. *Seminar Nasional Industri Dan Teknologi (SNIT)*, 212–236. www.jpip.or.id
- Yin, R.K. (2014). *Case Study Research: Design and Methods*. Third edition. Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc.

Jurnal dan Karya Ilmiah Lain

- Agustin, E. D., Sholihah, N. M., Ardiana, S. A., Ardiansyah, S. F., & Balgies, S. (2022). Kepuasan Kerja Dengan Komitmen Organisasi Pada Pemadam Kebakaran Di Kabupaten Sidoarjo. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 9(3), 573–585. <https://doi.org/10.37606/publik.v9i3.278>
- Anggraeni, F., & Saleh, S. A. (2020). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung) The Influence of Performance Based Budget Implementation on Performance Accountability of Government. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 36–44.
- Dini, A., Latif, & Vferdania, D. (2019). Factors inhibiting public participation in corruption prevention through e-government application in Indonesia. *Global Business & Management Research*, 11(1), 81-86.
- Erunke, C.E. (2022). Nature and Scope of Public Administration. *Researchgate*, <https://www.researchgate.net/publication/360977686>.
- Fajriansyah, Y., Elim, I., & Walandouw, S. K. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung Tahun Anggaran 2016-2017. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(3), 4465–4474.
- Fanggidae, H. C., Mesri, ¹, & Manafe, W. N. (2019). Evaluasi Anggaran Belanja Sebagai Alat Pengendalian Kebijakan Pembangunan Pada Pemerintah Daerah Expenditures Budget Evaluation: Control Tools for Development Policy on Local Government. *EKOPEM | Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 4(2), 2503–3093.
- Ferdinandito, A., & Haryani, T. N. (2021). Gaya Kepemimpinan Servant Leadership dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. *Wacana Publik*, 1(1), 190. <https://doi.org/10.20961/wp.v1i1.53145>
- Lanak, B. (2021). Peran Perangkat Desa dalam Peningkatan Pelayanan Publik di

Desa Gajahrejo, Kabupaten Malang. *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan ...*, 1(1), 16–24.

Matemilola, S., & Sijjuade, T. (2021). Public Participation. In Idowu et al (eds). (2021) *Encyclopedia of Sustainable Management*. Switzerland: Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-3-030-02006-4_515-1.

Mubarok, S., Zauhar, S., Setyowati, E., Suryadi. (2020). Policy implementation analysis: Exploration of George Edward III, Marilee S. Grindle, and Mazmanian and Sabatier Theories in the Policy Analysis Triangle Framework. *Journal of Public Administration Studies*, 5(1), 33-38.

Nadilla, N. (2019). Pelokalan Hak Asasi Manusia Melalui Partisipasi Publik dalam Kebijakan Berbasis Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 10(1), 85- 98.

Nurmandi, A., Muhammad Lutfi, Sumardi, S., & Zuly Qodir. (2021). Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pendekatan Model Demokrasi pada Era Otonomi Daerah. *Journal of Government Insight*, 1(1), 49–61. <https://doi.org/10.47030/jgi.v1i1.253>

Perera, R (2017). *The PESTLE Analysis*. International Kindle paperwhite

Rachman, T., Napitupulu, D. (2020). The quality of public participation in e-government through citizen acceptance factors. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 12(5), 340- 351.

Rahma, I. (2019). Partisipasi Publik dan Keterbukaan Informasi dalam Penyusunan Kebijakan (Studi Kasus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan). *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, 14(1), 80-95.

Ruhana, A.S. (2019). Democratizing public participation in maintaining religious harmony. *Dialog*, 42(2), 124- 133).

Sabir, R., Mustanir, A., Yasin, A., Firman, F., & Sofyan, W. (2022). Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa Di Desa Talawe. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 10(1), 49–54. <https://doi.org/10.55678/prj.v10i1.576>

Spicker, P. (2009). The nature of a public service. *International Journal of Public Administration*, 32(11), 970-991.

Van Meter, D.S., & Van Horn, C.E. (1975). The policy implementation process: a conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 446- 488.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Forum Konsultasi Politik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

